

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

A.P. Parlindungan, 1985, *Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Alumni, Bandung.

Bburhan Ashofa ,2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

BoediHarsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri, 1981, *Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta.

Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*.

H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.

I WayanSuandra,1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jamaludin Mahasari, 2008, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta.

K. Wantjik Saleh, 1982, *Hak Atas Tanah*,Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mudjiono, 1997, *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty Yogyakarta,Yogyakarta.

Raden Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.

Sarjita Hasan BasriNM, 2005, *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Tugujogja Pustaka, Jogjakarta.

Sudjito, 1987, *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Startegis*, Liberty, Yogyakarta.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

UripSantoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal

Chindy F. Lamia, “*Peralihan Hak Atas Tanah Warisan*”, Artikel Skripsi, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

D. Sumber Lain

<https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah> diakses pada tanggal 3 januari 2019, pukul 10.00 WIB

<https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 18.15 WIB

www.elib.unikom.ac.id, diakses pada tanggal 2 Desember 2018 pukul 18.00 WIB